

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN ...

TENTANG

PENGAWASAN, PENETAPAN STATUS PENGAWASAN, DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

| Batang Tubuh | Penjelasan | Perusahaan/ Instansi/ Satuan Kerja | Tanggapan | Usulan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang: |  |  |  |  |
| bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 128 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia serta untuk mendukung kebutuhan hukum terhadap pengaturan mengenai pengawasan, penetapan status pengawasan dan tindak lanjut pengawasan di sektor jasa keuangan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2013 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan NonBank, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya; | 1. UMUM

Sistem lembaga jasa keuangan yang sehat merupakan salah satu prasyarat untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, pertumbuhan perekonomian nasional serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap industri. Oleh karena itu setiap permasalahan lembaga jasa keuangan perlu mendapat tindakan yang tepat dan diselesaikan dengan cepat agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.Dalam upaya penyehatan suatu lembaga jasa keuangan, permasalahan yang timbul di lembaga jasa keuangan perlu diidentifikasi dengan cepat dan dirumuskan dengan tepat. Permasalahan yang ditemukan harus segera ditangani dan apabila permasalahan terus membesar maka pengawas perlu meningkatkan langkah-langkah pengawasan agar mampu memberikan solusi penyelesaian atas permasalahan yang terjadi. Langkah-langkah pengawasan yang cepat tersebut bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha dari lembaga jasa keuangan agar terus dapat menunaikan kewajibannya kepada konsumen. Dalam hal dinilai bahwa lembaga jasa keuangan tidak dapat lagi mempertahankan kesehatannya, pengawas harus dapat memutuskan dengan segera mengeluarkan lembaga jasa keuangan tersebut dari pasar dengan mencabut izin usahanya. Langkah pencabutan izin usaha dilakukan dengan segera setelah lembaga jasa keuangan diyakini tidak mampu menjaga tingkat kesehatannya agar meminimalkan kerugian konsumen.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah memberikan landasan hukum dalam rangka penguatan aspek pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan. Adapun untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 128 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta untuk mendukung kebutuhan hukum terhadap pengaturan mengenai pengawasan, status pengawasan dan tindak lanjut pengawasan di sektor jasa keuangan, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, Dan Tindak Lanjut Pengawasan bagi sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML).Pengaturan terhadap aspek *exit policy* bagi PVML diharapkan dapat memberikan panduan yang lebih komprehensif dan rinci mengenai status pengawasan, serta mekanisme dan tata cara pembubaran PVML baik bagi OJK maupun PVML sehingga hak nasabah dapat dipenuhi dengan segera, serta meminimalisir adanya permasalahan terkait hak nasabah akibat perangkat hukum yang kurang lengkap atau karena berlarut- larutnya proses pembubaran. Mekanisme *exit policy* bagi PVML yang efektif dan efisien pada akhirnya akan meningkatkan perlindungan konsumen PVML dan meningkatkan kepercayaan konsumen kepada PVML.  |  |  |  |
| Mengingat: |  |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
 |  |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 |   |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
 |  |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Menetapkan: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| MEMUTUSKAN: |  |  |  |  |
| PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGAWASAN, PENETAPAN STATUS PENGAWASAN, DAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB I |  |  |  |  |
| KETENTUAN UMUM |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang selanjutnya disebut PVML adalah lembaga jasa keuangan yang meliputi:
 |  |  |  |  |
| 1. lembaga pembiayaan, meliputi:
 |  |  |  |  |
| 1. perusahaan pembiayaan; atau
 |  |  |  |  |
| 1. perusahaan pembiayaan infrastruktur;
 |  |  |  |  |
| 1. perusahaan modal ventura;
 |  |  |  |  |
| 1. lembaga keuangan mikro; dan
 |  |  |  |  |
| 1. lembaga jasa keuangan lainnya, meliputi:
 |  |  |  |  |
| 1. perusahaan pergadaian;
 |  |  |  |  |
| 1. penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi;
 |  |  |  |  |
| 1. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
 |  |  |  |  |
| 1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
 |  |  |  |  |
| 1. PT Permodalan Nasional Madani;
 |  |  |  |  |
| 1. Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat; dan
 |  |  |  |  |
| 1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
 |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, termasuk Perusahaan Pembiayaan yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan.
 |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur adalah badan hukum yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur, termasuk yang menyelenggarakan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan infrastruktur.
 |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Modal Ventura adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha modal ventura termasuk yang melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan modal ventura.
 |  |  |  |  |
| 1. Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga keuangan mikro.
 |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian adalah badan hukum yang melakukan kegiatan usaha pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak, termasuk melakukan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pergadaian.
 |  |  |  |  |
| 1. Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara LPBBTI adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
 |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan yang selanjutnya disingkat PPSP adalah perusahaan yang didirikan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan pembiayaan sekunder perumahan dan kegiatan lain yang terkait dengan pengembangan pasar pembiayaan sekunder perumahan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.
 |  |  |  |  |
| 1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
 |  |  |  |  |
| 1. PT Permodalan Nasional Madani adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
 |  |  |  |  |
| 1. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat adalah badan hukum yang dibentuk untuk mengelola tabungan perumahan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat.
 |  |  |  |  |
| 1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur.
 |  |  |  |  |
| 1. Pengawasan adalah kegiatan pengukuran, penilaian, pengevaluasian, dan/atau kegiatan lain yang dilakukan terhadap PVML berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
 |  |  |  |  |
| 1. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan, serta untuk menilai dan memberikan kesimpulan mengenai penyelenggaraan usaha PVML.
 |  |  |  |  |
| 1. Direksi adalah organ PVML yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PVML untuk kepentingan PVML, sesuai dengan maksud dan tujuan PVML serta mewakili PVML, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Direksi bagi PVML berbentuk badan hukum koperasi.
 |  |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris adalah organ PVML yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi PVML yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi PVML berbentuk badan hukum koperasi.
 |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Kesehatan adalah hasil penilaian kondisi PVML yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja PVML.
 |  |  |  |  |
| 1. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan.
 |  |  |  |  |
| 1. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki saham atau yang setara dengan saham pada perusahaan dan/atau mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas perusahaan dimaksud.
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB II |  |  |  |  |
| PENGAWASAN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |  |
| Umum |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pengawasan terhadap PVML.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pengawasan terhadap PVML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pengawasan tidak langsung; dan
 |  |  |  |  |
| 1. Pengawasan langsung.
 |  |  |  |  |
| 1. Pengawasan langsung dapat dilakukan melalui:
 |  |  |  |  |
| 1. tatap muka secara langsung; dan/atau
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tatap muka secara elektronik.
 | Yang dimaksud dengan tatap muka secara elektronik antara lain dapat dilakukan dengan *video call/video conference* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |  |
| Pengawasan Tidak Langsung |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (2) huruf a dilakukan melalui pemantauan, penelitian, analisis, dan evaluasi terhadap:
 |  |  |  |  |
| 1. laporan yang disampaikan oleh PVML kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 | Yang dimaksud dengan laporan adalah laporan berkala dan/atau laporan insidental |  |  |  |
| 1. laporan yang disampaikan oleh pihak lain kepada Otoritas Jasa Keuangan;
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. data Pengawasan; dan/atau
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. informasi relevan lainnya yang diperoleh Otoritas Jasa Keuangan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta PVML untuk menyampaikan informasi dan/atau dokumen tertentu dalam rangka Pengawasan tidak langsung atas PVML.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |  |
| Pengawasan Langsung |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Pemeriksaan terhadap PVML.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam melakukan Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan Pemeriksaan terhadap:
 |  |  |  |  |
| 1. pemegang saham atau yang setara pada PVML;
 | Yang dimaksud dengan pemegang saham atau yang setara adalah pemegang saham bagi PVML yang berbentuk perseroan terbatas dan pendiri bagi PVML yang berbentuk koperasi. |  |  |  |
| 1. perusahaan anak dari PVML; dan/atau
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pihak lain yang melakukan transaksi dengan PVML.
 | Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak selain pemegang saham atau yang setara maupun perusahaan anak dari PVML.Yang dimaksud dengan pihak lain yang melakukan transaksi dengan PVML antara lain pihak yang melakukan kerja sama dengan PVML untuk melakukan pemasaran produknya. |  |  |  |
| 1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memperoleh gambaran menyeluruh tentang perkembangan usaha dan keadaan keuangan PVML, termasuk mendeteksi hal-hal yang dapat mempengaruhi Tingkat Kesehatan maupun kelangsungan usaha PVML;
 |  |  |  |  |
| 1. mendapatkan keyakinan atas kebenaran laporan yang disampaikan oleh PVML kepada Otoritas Jasa Keuangan, laporan yang dipublikasikan kepada masyarakat, dan informasi lain;
 |  |  |  |  |
| 1. memastikan kepatuhan PVML terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan peraturan perundang-undangan lain, dan pedoman ketentuan serta prosedur kerja yang ditetapkan PVML; dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. meneliti kebenaran atas dugaan adanya transaksi yang merupakan tindak pidana di bidang PVML.
 |  |  |  |  |
| 1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan di kantor PVML, di tempat lain yang terkait dengan PVML baik di dalam negeri atau di luar negeri, dan/atau di kantor Otoritas Jasa Keuangan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Paragraf 1 |  |  |  |  |
| Lingkup dan Frekuensi Pemeriksaaan |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Lingkup Pemeriksaan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan meliputi seluruh aspek atau aspek tertentu dari kegiatan usaha PVML.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Penentuan lingkup Pemeriksaan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pengawasan berbasis risiko bagi PVML yang sudah menerapkan Pengawasan berbasis risiko; atau
 |  |  |  |  |
| 1. rencana Pemeriksaan bagi PVML yang belum menerapkan Pengawasan berbasis risiko.
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan Pemeriksaan terhadap PVML secara berkala maupun sewaktu-waktu.
 | Pemeriksaan sewaktu-waktu dilakukan antara lain untuk mendalami hasil Pengawasan tidak langsung dan/atau adanya indikasi penyimpangan dari praktik PVML yang sehat. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan frekuensi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 | Penetapan pemeriksaan dapat didasarkan pada faktor ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan/atau ukuran PVML. |  |  |  |
| 1. Frekuensi Pemeriksaan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan penilaian pengawas atas kondisi Tingkat Kesehatan atau faktor yang berdampak terhadap kegiatan usaha PVML.
 | Yang dimaksud dengan “penilaian pengawas atas kondisi Tingkat Kesehatan” adalah penilaian atas kondisi PVML yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja PVML.Yang dimaksud dengan “penilaian pengawas atas faktor yang berdampak terhadap kegiatan usaha” adalah penilaian pengawas atas faktor kelembagaan, faktor keuangan, faktor operasional, dan/atau faktor lainnya yang diperoleh pengawas dari laporan berkala bagi PVML yang belum menerapkan pengawasan berbasis risiko. |  |  |  |
| 1. Pemeriksaan sewaktu-waktu merupakan:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pemeriksaan tematik; dan
 |  |  |  |  |
| 1. Pemeriksaan khusus dugaan tindak pidana pada PVML.
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Paragraf 2 |  |  |  |  |
| Tim Pemeriksa |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh tim pemeriksa.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. pegawai Otoritas Jasa Keuangan yang ditugaskan untuk melakukan Pemeriksaan;
 |  |  |  |  |
| 1. pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau
 |  |  |  |  |
| 1. gabungan antara pegawai Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain yang ditunjuk Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Tim pemeriksa dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b wajib memenuhi syarat: |  |  |  |  |
| 1. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan;
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. bukan pihak terafiliasi terhadap objek yang diperiksa;
 | Yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah:1. anggota Dewan Komisaris, Direksi, pejabat atau karyawan PVML;
2. pihak yang memberikan jasanya kepada PVML antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya; dan/atau
3. pihak yang menurut penilaian OJK turut serta mempengaruhi pengelolaan PVML antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga Dewan Komisaris, dan keluarga Direksi.
 |  |  |  |
| 1. memiliki sikap mental yang baik dan etika serta tanggung jawab profesi yang tinggi;
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. bersikap independen, jujur, dan objektif;
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. kompeten di bidangnya dan memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PVML dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain; dan
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. secara terus-menerus mengikuti program pendidikan profesi dalam bidangnya masing-masing.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menunjuk akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagai tim pemeriksa.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Akuntan publik, aktuaris, dan/atau penilai independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan surat perintah kerja kepada pihak lain yang ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Penunjukan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat perintah kerja dan kerangka acuan kerja (*terms of reference*) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat perintah kerja.
 | Kerangka acuan kerja (*terms of reference)* memuat antara lain:* 1. tujuan dan ruang lingkup Pemeriksaan;
	2. jangka waktu pelaksanaan;
	3. penyusunan laporan hasil Pemeriksaan;
	4. teknik dan etika Pemeriksaan;
	5. jumlah dan kualifikasi tenaga pemeriksa yang digunakan;
	6. kerahasiaan Pemeriksaan; dan
	7. kertas kerja Pemeriksaan.
 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Paragraf 3 |  |  |  |  |
| Kewajiban PVML |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. PVML dan/atau pihak terkait yang dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memenuhi permintaan tim pemeriksa untuk memberikan atau meminjamkan buku, berkas, catatan, disposisi, memorandum, dokumen lain yang dibutuhkan, data elektronik, termasuk salinannya dan barang lainnya yang dianggap perlu dalam mendukung Pengawasan;
 |  |  |  |  |
| 1. memberikan keterangan dan penjelasan kepada tim pemeriksa berdasarkan fakta dan kondisi sebenarnya yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa baik secara lisan maupun tertulis;
 |  |  |  |  |
| 1. memberi kesempatan kepada tim pemeriksa untuk meneliti keberadaan dan penggunaan seluruh sarana fisik yang berkaitan dengan aspek yang diperiksa;
 |  |  |  |  |
| 1. menghadirkan pihak ketiga atas permintaan tim pemeriksa untuk memberikan data, dokumen, dan/atau keterangan kepada pemeriksa terkait dengan Pemeriksaan; dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. memenuhi permintaan lainnya dari tim pemeriksa untuk mendukung proses Pemeriksaan terhadap PVML dan pihak terkait.
 |  |  |  |  |
| 1. PVML wajib menyampaikan dokumen Pemeriksaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PVML dan/atau pihak terkait yang dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilarang untuk menghambat/menghalang-halangi proses Pemeriksaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
 | Yang dimaksud dengan “menghambat proses Pemeriksaan”antara lain apabila PVML dan/atau pihak terkait yangdilakukan Pemeriksaan tidak memperlihatkan dokumen atau hal lain yang diperlukan dalam Pemeriksaan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan,atau meminjamkan buku, memberikan catatan, dokumen, atau keterangan yang tidak benar. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Paragraf 4 |  |  |  |  |
| Tata Cara Pemeriksaan |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa berdasarkan surat perintah Pemeriksaan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Tim pemeriksa wajib menyampaikan surat perintah Pemeriksaan kepada PVML.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Sebelum dilakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada PVML.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Surat pemberitahuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi sebagai berikut:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. susunan tim pemeriksa;
 |  |  |  |  |
| 1. ruang lingkup Pemeriksaan;
 |  |  |  |  |
| 1. tujuan Pemeriksaan;
 |  |  |  |  |
| 1. dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Pemeriksaan; dan
 |  |  |  |  |
| 1. batas waktu penyampaian dokumen kepada Pemeriksa.
 |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menyampaikan surat pemberitahuan Pemeriksaan kepada PVML pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemeriksaan apabila pemberitahuan sebelum pelaksanaan Pemeriksaan:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. mempersulit atau menghambat proses Pemeriksaan;
 |  |  |  |  |
| 1. mengaburkan keadaan yang sebenarnya; dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. menyembunyikan atau menghilangkan data, keterangan, atau laporan yang diperlukan dalam rangka Pemeriksaan.
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1.
 |  |  |  |  |
| 1. Dalam proses Pemeriksaan secara berkala, tim pemeriksa melakukan konfirmasi kepada Direksi PVML atas temuan pada Pemeriksaan
 | Yang dimaksud dengan konfirmasi adalah kegiatan untuk meminta penjelasan tambahan kepada Direksi PVML atas temuan Pemeriksa dengan meminta bukti atau fakta tambahan atas temuan dimaksud. |  |  |  |
| 1. Sebelum Pemeriksaan secara berkala berakhir, tim pemeriksa melakukan pembahasan terlebih dahulu dengan Direksi PVML atas temuan pada Pemeriksaan.
 | Yang dimaksud dengan pembahasan terlebih dahulu atau pra-*exit meeting* adalah kegiatan untuk memastikan hasil Pemeriksaan oleh tim pemeriksa telah sesuai dengan bukti atau fakta dan dapat diterima oleh Direksi PVML. |  |  |  |
| 1. Pada saat Pemeriksaan secara berkala berakhir, tim pemeriksa melakukan pertemuan dengan Direksi PVML dan/atau pimpinan dari pihak terkait atas hasil Pemeriksaan dan tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan.
 | Pertemuan atau *exit meeting* bertujuan agar tidak terdapat perbedaan pendapat antara tim pemeriksa dengan Direksi PVML dan/atau pimpinan dari pihak terkait atas hasil Pemeriksaan. |  |  |  |
| 1. Hasil pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang berisi hasil Pemeriksaan dan rekomendasi atau tindak lanjut yang ditandatangani oleh tim pemeriksa dan Direksi PVML.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Direksi PVML menolak untuk menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tim pemeriksa menetapkan berita acara tanpa ditandatangani oleh Direksi PVML dan/atau pimpinan dari pihak terkait
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal Direksi PVML menolak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penolakan dimaksud harus disertai dengan alasan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Jangka waktu Pemeriksaan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan maupun kompleksitas Pemeriksaan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Setelah proses Pemeriksaan secara berkala berakhir, tim pemeriksa menyusun laporan hasil Pemeriksaan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau yang setara pada PVML.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.
 | Laporan hasil Pemeriksaan dimaksudkan sebagai alat pembinaan untuk peningkatan kinerja PVML. Oleh karena itu direksi dan dewan komisaris PVML tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan data dan/atau informasi yang terdapat dalam laporan hasil Pemeriksaan |  |  |  |
| 1. Penggunaan laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pihak di luar PVML yang diperiksa harus dikonsultasikan dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali diatur lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 | Cukup jelas.  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Paragraf 5Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. PVML wajib melakukan langkah tindak lanjut sesuai rekomendasi yang terdapat dalam laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PVML wajib melaporkan pelaksanaan langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling sedikit setiap bulan atau sesuai laporan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 | Laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan OJK dapat memuat kewajiban bagi PVML untuk menyampaikan laporan pelaksanaan langkah-langkah tindak lanjut hasil pemeriksaan kepada OJK. Apabila laporan hasil pemeriksaan tidak menyebutkan secara spesifik mengenai batas waktu kewajiban pelaporan tersebut, PVML wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil Pemeriksaan paling sedikit setiap bulan. |  |  |  |
| 1. Kewajiban melaporkan pelaksanaan langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir apabila Otoritas Jasa Keuangan menilai bahwa PVML telah melaksanakan langkah tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Penilaian Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PVML melalui surat.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Paragraf 6 |  |  |  |  |
| Pemeriksaan Oleh Pihak Asing |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Pemeriksaan terhadap PVML yang sebagian sahamnya dimiliki oleh lembaga keuangan asing yang dilakukan oleh pemeriksa dari otoritas pengawas sektor jasa keuangan dari negara lain hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum dilakukannya Pemeriksaan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta kepada pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar dalam Pemeriksaan sekaligus memeriksa hal-hal yang dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan pegawai Otoritas Jasa Keuangan untuk mendampingi pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama kegiatan Pemeriksaan berlangsung.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pemberian izin pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menganut asas timbal balik yang dituangkan secara tertulis.
 | Yang dimaksud dengan “menganut asas timbal balik” adalah dalam hal Otoritas Jasa Keuangan diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan di suatu negara, terhadap negara tersebut akan diterapkan perlakuan yang sama, demikianpula sebaliknya. |  |  |  |
| 1. Pemeriksa dari otoritas pengawas sektor jasa keuangan dari negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. PVML wajib melaporkan rencana pemeriksaan terhadap kantor cabang dari PVML yang berkedudukan di luar negeri yang dilakukan oleh pemeriksa internal atau kantor akuntan publik yang ditugaskan kantor pusat PVML yang bersangkutan kepada Otoritas Jasa Keuangan
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PVML wajib melaporkan rencana pemeriksaan terhadap PVML yang sebagian sahamnya dimiliki pemegang saham yang berkedudukan di luar negeri yang dilakukan oleh pemeriksa yang ditugaskan oleh pemegang saham yang berkedudukan di luar negeri kepada Otoritas Jasa Keuangan
 | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. PVML yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan/atau Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| * 1. peringatan tertulis;
 |  |  |  |  |
| * 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 |  |  |  |  |
| * 1. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 |  |  |  |  |
| * 1. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 |  |  |  |  |
| * 1. pembatalan persetujuan;
 |  |  |  |  |
| * 1. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah; dan/atau
 |  |  |  |  |
| * 1. denda administratif.
 |  |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif yang berakhir dengan sendirinya.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| * 1. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 |  |  |  |  |
| * 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 |  |  |  |  |
| * 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait PVML yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Pemegang saham, perusahaan anak, dan pihak lain yang melakukan transaksi dengan PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang tidak memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis;
 |  |  |  |  |
| 1. pembatalan persetujuan;
 |  |  |  |  |
| 1. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah; dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. denda administratif.
 |  |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal pemegang saham, perusahaan anak, dan pihak lain yang melakukan transaksi dengan PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif yang berakhir dengan sendirinya.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait PVML yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Pihak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (7) dikenakan sanksi administratif berupa:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis;
 |  |  |  |  |
| 1. rekomendasi pembatalan pendaftaran di Otoritas Jasa Keuangan atas pihak lain yang ditunjuk meliputi akuntan publik, aktuaris dan/ atau penilai independen;
 |  |  |  |  |
| 1. rekomendasi pencabutan atau pembatalan izin usaha pihak lain yang ditunjuk kepada instansi yang berwenang; dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. denda administratif.
 |  |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal pihak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif yang berakhir dengan sendirinya.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait PVML yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB III |  |  |  |  |
| PENETAPAN STATUS PENGAWASAN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian KesatuUmum |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status Pengawasan terhadap PVML sebagai berikut:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan;
 |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
 |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Modal Ventura;
 |  |  |  |  |
| 1. Lembaga Keuangan Mikro;
 |  |  |  |  |
| 1. Perusahaan Pergadaian; dan
 |  |  |  |  |
| 1. Penyelenggara LPBBTI.
 |  |  |  |  |
| 1. Status Pengawasan terhadap PVML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 |  |  |  |  |
| * 1. Pengawasan normal;
 | Yang dimaksud dengan “Pengawasan normal” adalah pengawasan terhadap PVML yang dinilai:1. tidak memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha; atau
2. tidak mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.
 |  |  |  |
| * 1. Pengawasan intensif; atau
 | Yang dimaksud dengan “Pengawasan intensif” adalah pengawasan terhadap PVML yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. |  |  |  |
| * 1. Pengawasan khusus.
 | Yang dimaksud dengan “Pengawasan khusus” adalah pengawasan terhadap PVML yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |  |
| Kriteria dan Jangka Waktu Status Pengawasan Intensif  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status Pengawasan intensif bagi PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), jika memenuhi kriteria:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Tingkat Kesehatan ditetapkan pada Peringkat Komposit 4 (empat); dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. memenuhi paramater kuantitatif.
 |  |  |  |  |
| 1. Pemenuhan parameter kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. bagi Perusahaan Pembiayaan, memenuhi parameter kuantitatif:
 |  |  |  |  |
| 1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih besar atau sama dengan 0% (nol persen) dan lebih kecil dari 50% (lima puluh persen); dan/atau
 | Yang dimaksud dengan “rasio ekuitas terhadap modal disetor” adalah perbandingan antara jumlah ekuitas perusahaan pembiayaan terhadap jumlah modal disetor. |  |  |  |
| 1. rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto lebih besar dari 5% (lima persen) dan lebih kecil atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen);
 | Yang dimaksud dengan “rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto” adalah perbandingan antara piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, setelah dikurangi cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan untuk piutang pembiayaan yang terdiri dari piutang pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, terhadap total piutang pembiayaan. |  |  |  |
| 1. bagi Perusahaan Modal Ventura, memenuhi parameter kuantitatif:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih besar atau sama dengan 0% (nol persen) dan lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto lebih besar dari 5% (lima persen) dan lebih kecil atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen);
 |  |  |  |  |
| 1. bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, memenuhi parameter kuantitatif:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih besar atau sama dengan 0% (nol persen) dan lebih kecil dari 50% (lima puluh persen); dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto lebih besar dari 5% (lima persen) namun lebih kecil atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen);
 |  |  |  |  |
| 1. bagi Lembaga Keuangan Mikro, memenuhi parameter kuantitatif:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 75% (tujuh puluh lima persen); dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto lebih besar dari 5% (lima persen) dan lebih kecil dari 25% (dua puluh lima persen);
 |  |  |  |  |
| 1. bagi Perusahaan Pergadaian, memenuhi parameter kuantitatif:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih besar atau sama dengan 0% (nol persen) dan lebih kecil dari 50% (lima puluh persen);
 |  |  |  |  |
| 1. rasio kualitas piutang pinjaman bermasalah neto lebih besar atau sama dengan 5% (lima persen) dan lebih kecil dari 25% (dua puluh lima persen); dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. bagi Penyelenggara LPBBTI, memenuhi parameter kuantitatif:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih besar atau sama dengan 0% (nol persen) dan lebih kecil dari 50% (lima puluh persen); dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. rasio kualitas pendanaan bermasalah neto lebih besar atau sama dengan dari 5% (lima persen) dan lebih kecil dari 25% (dua puluh lima persen).
 |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PVML dengan status Pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status Pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 | Perhitungan jangka waktu status pengawasan PVML paling lama 1 (satu) tahun termasuk jangka waktu penyusunan dan revisi rencana tindak. |  |  |  |
| 1. jangka waktu status Pengawasan intensif berakhir; dan
 |  |  |  |  |
| 1. PVML masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22,
 |  |  |  |  |
| paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. |  |  |  |  |
| 1. Penetapan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui.
 | Penilaian Otoritas Jasa Keuangan diberikan berdasarkan keyakinan bahwa dengan adanya perpanjangan waktu maka PVML dimaksud dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.Yang dimaksud dengan “penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui” antara lain proses akuisisi lembaga pembiayaan. |  |  |  |
| 1. Penetapan perpanjangan jangka waktu status Pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan peningkatan tindakan Pengawasan yang harus dilakukan oleh PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
 | Yang dimaksud dengan “peningkatan tindakan Pengawasan” adalah peningkatan jumlah tindakan Pengawasan dan/atau penerapan tindakan Pengawasan yang berdampak lebih berat bagi PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dari tindakan Pengawasan yang ditetapkan sebelumnya. |  |  |  |
| 1. Apabila jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peningkatan status Pengawasan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. PVML yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat tidak ditetapkan pada status Pengawasan intensif dalam jangka waktu tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan jika PVML:
 | PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang tidak ditetapkan ke dalam status PVML dalam status pengawasan intensif merupakan PVML yang memiliki permasalahan non struktural dan diyakini dapat tetap memenuhi kriteria PVML dalam pengawasan normal. |  |  |  |
| 1. dalam proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan; dan/atau
 | Yang dimaksud dengan “dalam proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan” apabila PVML telah menyampaikan permohonan persetujuan rencana penggabungan, peleburan, dan/atau pengambilalihan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan usaha dan kelembagaan PVML. |  |  |  |
| 1. dalam proses penambahan setoran modal yang paling sedikit telah tercatat dalam kriteria dana setoran modal,
 | Yang dimaksud dengan “kriteria dana setoran modal” adalah apabila pemegang saham PVML telah melakukan setoran modal kepada PVML melalui *escrow account* yang dapat meningkatkan permodalan PVML. |  |  |  |
| dalam rangka memenuhi kriteria status Pengawasan normal. |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PVML yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan status Pengawasan normal.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Bagi PVML yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi kriteria status Pengawasan normal serta diketahui bahwa:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tidak menindaklanjuti proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan; dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. tidak menindaklanjuti proses penambahan setoran modal;
 |  |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sebagai PVML dengan status Pengawasan intensif. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perubahan status Pengawasan dari status Pengawasan intensif menjadi status Pengawasan normal apabila PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22. | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |  |
| Kriteria dan Jangka Waktu Status Pengawasan Khusus |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status Pengawasan khusus bagi PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), jika memenuhi kriteria:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. jangka waktu status Pengawasan intensif telah berakhir;
 |  |  |  |  |
| 1. Tingkat Kesehatan ditetapkan pada Peringkat Komposit 5 (lima);
 |  |  |  |  |
| 1. memenuhi paramater kuantitatif; dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. memenuhi kriteria selain huruf a, huruf b, atau huruf c yang berdampak pada kelangsungan usaha PVML dan/atau merugikan kepentingan nasabah/masyarakat.
 |  |  |  |  |
| 1. Pemenuhan parameter kuantitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. bagi Perusahaan Pembiayaan, memenuhi parameter kuantitatif:
 |  |  |  |  |
| 1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih kecil dari 0% (nol persen); dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen);
 |  |  |  |  |
| 1. bagi Perusahaan Modal Ventura, memenuhi parameter kuantitatif:
 |  |  |  |  |
| 1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih kecil dari 0% (nol persen); dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen);
 |  |  |  |  |
| 1. bagi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, memenuhi parameter kuantitatif:
 |  |  |  |  |
| 1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih kecil dari 0% (nol persen); dan/atau
 |   |  |  |  |
| 1. rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto lebih besar dari 25% (dua puluh lima persen);
 |  |  |  |  |
| 1. bagi Lembaga Keuangan Mikro, memenuhi parameter kuantitatif:
 |  |  |  |  |
| 1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih kecil dari 50% (lima puluh persen); dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen);
 |   |  |  |  |
| 1. bagi Perusahaan Pergadaian, memenuhi parameter kuantitatif:
 |  |  |  |  |
| 1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih kecil dari 0% (nol persen);
 |  |  |  |  |
| 1. rasio kualitas piutang pinjaman bermasalah neto lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen); dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. bagi Penyelenggara LPBBTI, memenuhi parameter kuantitatif:
 |  |  |  |  |
| 1. rasio ekuitas terhadap modal disetor lebih kecil dari 0% (nol persen); dan/atau
 |   |  |  |  |
| 1. rasio kualitas pendanaan bermasalah neto lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima persen).
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PVML dengan status Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perpanjangan jangka waktu status Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. jangka waktu status Pengawasan khusus berakhir; dan
 |  |  |  |  |
| 1. PVML masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
 |  |  |  |  |
| paling banyak 1 (satu) kali dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan. |  |  |  |  |
| 1. Penetapan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas penilaian Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan penyelesaian atas rencana tindak yang telah disetujui.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Penetapan perpanjangan jangka waktu status Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan peningkatan tindakan Pengawasan yang harus dilakukan oleh PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
 | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. PVML yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat tidak ditetapkan pada status Pengawasan khusus dalam jangka waktu tertentu oleh Otoritas Jasa Keuangan jika PVML:
 |  |  |  |  |
| 1. dalam proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan; dan/atau
 | Lihat penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf a |  |  |  |
| 1. dalam proses penambahan setoran modal yang paling sedikit telah tercatat dalam kriteria dana setoran modal,
 | Lihat penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b |  |  |  |
| dalam rangka memenuhi kriteria status Pengawasan normal. |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan PVML yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam status Pengawasan normal.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Bagi PVML yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan belum memenuhi kriteria status Pengawasan normal serta diketahui bahwa:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. tidak menindaklanjuti proses penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan; dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. tidak menindaklanjuti proses penambahan setoran modal;
 |  |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan menetapkan sebagai PVML dalam status Pengawasan khusus. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan perubahan status Pengawasan dari status Pengawasan khusus menjadi status Pengawasan normal dan/atau Pengawasan intensif apabila PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB IV |  |  |  |  |
| TINDAK LANJUT PENGAWASAN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kesatu |  |  |  |  |
| Kewenangan Tindakan Pengawasan |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan Pengawasan pada PVML.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam pelaksanaan tindakan Pengawasan terhadap PVML, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan PVML untuk melakukan tindakan tertentu.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Tindakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 |  |  |  |  |
| 1. meminta dan/atau memerintahkan PVML untuk memperbaiki rencana bisnis;
 |  |  |  |  |
| 1. meminta dan/atau memerintahkan PVML untuk tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak terkait;
 |  |  |  |  |
| 1. meminta dan/atau memerintahkan PVML untuk tidak melakukan kegiatan tertentu;
 |  |  |  |  |
| 1. meminta dan/atau memerintahkan PVML untuk membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
 |  |  |  |  |
| 1. meminta dan/atau memerintahkan PVML untuk tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;
 |  |  |  |  |
| 1. meminta dan/atau memerintahkan PVML untuk membatasi atau tidak melakukan pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru;
 |  |  |  |  |
| 1. meminta dan/atau memerintahkan PVML untuk menghapusbukukan piutang pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian PVML dengan modal PVML;
 |  |  |  |  |
| 1. meminta dan/atau memerintahkan PVML untuk membatasi penerimaan pinjaman dan/atau penerbitan surat utang;
 |  |  |  |  |
| 1. meminta dan/atau memerintahkan PVML untuk mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan liabilitas PVML kepada PVML dan/atau pihak terkait;
 |  |  |  |  |
| 1. meminta dan/atau memerintahkan PVML untuk membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak terkait;
 |  |  |  |  |
| 1. membatasi kewenangan pemegang saham atau anggota PVML, rapat umum pemegang saham atau rapat umum anggota, Dewan Komisaris, Direksi, dan pemegang saham atau yang setara;
 |  |  |  |  |
| 1. meminta dan/atau memerintahkan pemegang saham atau rapat umum anggota PVML untuk mengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 |  |  |  |  |
| 1. meminta dan/atau memerintahkan PVML untuk menunda atau tidak melakukan distribusi laba;
 |  |  |  |  |
| 1. meminta dan/atau memerintahkan pemegang saham atau anggota PVML untuk memperkuat permodalan melalui setoran modal dan/atau pemberian pinjaman subordinasi;
 |  |  |  |  |
| 1. meminta dan/atau memerintahkan pemegang saham untuk melakukan penggabungan atau peleburan;
 |  |  |  |  |
| 1. meminta pemegang saham atau yang setara untuk menjual kepemilikan Bank kepada pembeli;
 |  |  |  |  |
| 1. menunjuk pengelola statuter dan memerintahkan PVML untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelola statuter yang ditempatkan di PVML; dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. memerintahkan PVML untuk melakukan tindakan lain yang dianggap perlu.
 |  |  |  |  |
| 1. Pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan tindakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| * + - 1. sanksi administratif;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. instruksi tertulis; dan/atau
 |  |  |  |  |
| * + - 1. perintah tertulis.
 |  |  |  |  |
| 1. PVML wajib memenuhi instruksi tertulis dan/atau perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan/atau huruf c.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam pemenuhan instruksi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, PVML menyampaikan komitmen yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan dari:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Direksi dan/atau Dewan Komisaris PVML, untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu; dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. PSP, untuk menanggulangi masalah yang merupakan kewajiban PSP.
 |  |  |  |  |
| 1. Dalam pemenuhan perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perintah tertulis.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Kedua |  |  |  |  |
| Tindak Lanjut Pengawasan Terhadap Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, Perusahaan Pergadaian, dan Penyelenggara LPBBTI |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan penetapan status Pengawasan PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pengawasan intensif;
 |  |  |  |  |
| 1. Pengawasan khusus,
 |  |  |  |  |
| kepada Direksi dan Komisaris dengan disertai alasan penetapan status Pengawasan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. PVML dengan status Pengawasan intensif atau Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan status Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. rencana perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi PVML disertai jangka waktu penyelesaian; dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. jangka waktu perbaikan.
 |  |  |  |  |
| 1. Rencana perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. memperbaiki rencana bisnis;
 |  |  |  |  |
| 1. tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak terkait;
 |  |  |  |  |
| 1. tidak melakukan kegiatan tertentu;
 |  |  |  |  |
| 1. membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
 |  |  |  |  |
| 1. tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;
 |  |  |  |  |
| 1. membatasi atau tidak melakukan pertumbuhan aset, penyertaan, dan/atau penyediaan dana baru;
 |  |  |  |  |
| 1. menghapusbukukan piutang pembiayaan yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian PVML dengan modal PVML;
 |  |  |  |  |
| 1. membatasi penerimaan pinjaman dan/atau penerbitan surat utang;
 |  |  |  |  |
| 1. menjual sebagian atau seluruh aset dan/atau mengalihkan liabilitas PVML kepada PVML dan/atau pihak terkait;
 |  |  |  |  |
| 1. mengalihkan aset dan/atau liabilitas kepada pihak lain;
 |  |  |  |  |
| 1. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota dewan pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak terkait;
 |  |  |  |  |
| 1. mengganti anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 |  |  |  |  |
| 1. menunda atau tidak melakukan distribusi laba;
 |  |  |  |  |
| 1. memperkuat permodalan melalui setoran modal dan/atau penerimaan pinjaman subordinasi;
 |  |  |  |  |
| 1. melakukan penggabungan atau peleburan; dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. tindakan lain.
 |  |  |  |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu disetujui oleh rapat umum pemegang saham atau rapat umum anggota dalam hal rencana tindak dimaksud memuat rencana penambahan modal disetor atau rencana penggabungan atau peleburan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) harus memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau persetujuan atas rencana tindak yang disampaikan oleh PVML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak rencana tindak diterima secara lengkap
 |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan perbaikan rencana tindak dalam hal rencana tindak tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan yang belum dapat dipenuhi oleh PVML namun rencana tindak tersebut masih memerlukan perbaikan.
 |  |  |  |  |
| 1. PVML wajib menyampaikan rencana tindak yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan perbaikan atas rencana tindak dari Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal PVML telah menyampaikan rencana tindak yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penolakan terhadap rencana tindak dalam hal rencana tindak tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan PVML memenuhi kriteria status Pengawasan intensif atau Pengawasan khusus.
 |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal rencana tindak yang disampaikan ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan, PVML wajib menyampaikan rencana tindak baru paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan penolakan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas rencana tindak dalam hal rencana tindak tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan yang menyebabkan PVML memenuhi kriteria status Pengawasan intensif atau Pengawasan khusus.
 |  |  |  |  |
| 1. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau persetujuan PVML dapat melaksanakan rencana tindak.
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. PVML wajib melaksanakan rencana tindak yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. PVML wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan rencana tindak secara bulanan yang disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 |  |  |  |  |
| 1. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh PVML; dan
 |  |  |  |  |
| 1. waktu pelaksanaan perbaikan.
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| * + 1. Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. kondisi PVML semakin memburuk;
 |  |  |  |  |
| 1. terdapat kegiatan usaha tertentu yang menjadi salah satu penyebab memburuknya kondisi PVML; dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh:
 |  |  |  |  |
| 1. Direksi;
 |  |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris;
 |  |  |  |  |
| 1. dewan pengawas syariah; dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. PSP,
 |  |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan Pengawasan berupa pembatasan kegiatan usaha tertentu terhadap PVML dengan status Pengawasan intensif atau Pengawasan khusus. |  |  |  |  |
| * + 1. Pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada PVML disertai dengan jangka waktu pembatasan kegiatan usaha tertentu.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| * + 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan pembatasan kegiatan usaha tertentu terhadap PVML sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada situs web Otoritas Jasa Keuangan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. PVML yang dikenai pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) wajib:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. menghentikan kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan; dan
 |  |  |  |  |
| 1. memberitahukan kepada seluruh jaringan kantor mengenai kegiatan usaha tertentu yang dikenakan pembatasan.
 |  |  |  |  |
| 1. Penghentian kegiatan usaha tertentu dan pemberitahuan kepada seluruh jaringan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembatasan kegiatan usaha tertentu dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
 | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. PVML dengan status Pengawasan khusus ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disehatkan, jika berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan diketahui bahwa:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. batas waktu status Pengawasan khusus berakhir; dan
 |  |  |  |  |
| 1. PVML masih memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
 |  |  |  |  |
| 1. Dalam hal PVML dengan status Pengawasan khusus yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disehatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha PVML.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pencabutan izin usaha PVML sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Direksi;
 |  |  |  |  |
| 1. Dewan Komisaris; dan
 |  |  |  |  |
| 1. PSP.
 |  |  |  |  |
| 1. Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pencabutan izin usaha PVML sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada situs web Otoritas Jasa Keuangan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Ketiga |  |  |  |  |
| Tindak Lanjut Pengawasan Terhadap Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani, Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat, PT Sarana Multi Infrastruktur |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| * + 1. Berdasarkan hasil Pengawasan terhadap:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| * + - 1. Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. PT Permodalan Nasional Madani;
 |  |  |  |  |
| * + - 1. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat; dan/atau
 |  |  |  |  |
| * + - 1. PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero),
 |  |  |  |  |
| Otoritas Jasa Keuangan dapat menilai perusahaan dimaksud memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha atau mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha. |  |  |  |  |
| * + 1. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pemberitahuan kepada PVML sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai hasil penilaian dengan disertai alasan.
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |  |  |
| 1. Ketentuan mengenai:
 |  |  |  |  |
| 1. persyaratan dan tata cara penyampaian rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33;
 |  |  |  |  |
| 1. pelaksanaan dan pelaporan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; dan
 |  |  |  |  |
| 1. pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36,
 |  |  |  |  |
| berlaku secara *mutatis mutandis* bagi PVML sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1). |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagian Keempat |  |  |  |  |
| Sanksi Administratif |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. PVML yang melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36, Pasal 39 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. peringatan tertulis; dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. denda administratif.
 |  |  |  |  |
| 1. Sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal PVML telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif yang berakhir dengan sendirinya.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk:
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 |  |  |  |  |
| 1. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 |  |  |  |  |
| 1. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait PVML yang menyebabkan PVML melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB V |  |  |  |  |
| KETENTUAN PERALIHAN |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagi Lembaga Keuangan Mikro, pemenuhan ketentuan mengenai: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. kriteria Tingkat Kesehatan dalam penetapan status Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 ayat (1) huruf b;
 |  |  |  |  |
| 1. kriteria parameter kuantitatif berupa rasio kualitas piutang pembiayaan bermasalah neto dalam penetapan status Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf d angka 2 dan Pasal 26 ayat (2) huruf d angka 2,
 |  |  |  |  |
| dinyatakan mulai berlaku 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagi Perusahaan Pergadaian, ketentuan mengenai: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. kriteria Tingkat Kesehatan dalam penetapan status Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 ayat (1) huruf b;
 |  |  |  |  |
| 1. kriteria parameter kuantitatif berupa rasio ekuitas terhadap modal disetor dalam penetapan status Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e angka 1 dan Pasal 26 ayat (2) huruf e angka 1;
 |  |  |  |  |
| 1. kriteria parameter kuantitatif berupa rasio kualitas piutang pinjaman bermasalah neto dalam penetapan status Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e angka 2 dan Pasal 26 ayat (2) huruf e angka 2,
 |  |  |  |  |
| dinyatakan mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Bagi Penyelenggara LPBBTI, ketentuan mengenai: | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. kriteria Tingkat Kesehatan dalam penetapan status Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 ayat (1) huruf b;
 |  |  |  |  |
| 1. kriteria parameter kuantitatif berupa rasio ekuitas terhadap modal disetor dalam penetapan status Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f angka 1 dan Pasal 26 ayat (2) huruf f angka 1;
 |  |  |  |  |
| 1. kriteria parameter kuantitatif berupa rasio kualitas pendanaan bermasalah neto dalam penetapan status Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f angka 2 dan Pasal 26 ayat (2) huruf f angka 2,
 |  |  |  |  |
| dinyatakan mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Penetapan Perusahaan Pembiayaan dalam status Pengawasan intensif atau khusus sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pemberitahuan terkait penetapan status Pengawasan selanjutnya oleh Otoritas Jasa Keuangan.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Rencana tindak yang telah disampaikan oleh Perusahaan Pembiayaan dalam status Pengawasan intensif dan khusus sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditetapkan, tetap diproses sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status Dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| BAB VI |  |  |  |  |
| KETENTUAN PENUTUP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 /POJK.05/2022 tentang Perubahan atas Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/POJK.05/2018 tentang Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6/OJK);
 |  |  |  |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6357);
 |  |  |  |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 46 /POJK.05/2020 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6576);
 |  |  |  |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/POJK.05/2022 tentang ﻿Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1/OJK);
 |  |  |  |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK);
 |  |  |  |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengawasan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 23/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23/OJK);
 |  |  |  |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha PMV dan PMVS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 43/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65/OJK),
 |  |  |  |  |
| dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 1. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5576) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6506), dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, Penyelenggara LPBBTI, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani.
 | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku ketentuan mengenai penetapan status dan tindak lanjut pengawasan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan NonBank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6690) dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan Pembiayaan.
 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari:  | Cukup jelas. |  |  |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5576) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6506);; dan
 |  |  |  |  |
| 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.05/2021 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan NonBank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6690),
 |  |  |  |  |
| dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. | Cukup jelas. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ..... 2024  KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,    MAHENDRA SIREGAR  |   |  |  |  |
|   Diundangkan di Jakarta pada tanggal  MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,    YASONNA H. LAOLY  LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR  | TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …..  |  |  |  |